

**PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA DALAM HAL DIREKSI  
MELAKUKAN TINDAKAN *ULTRA VIRES*  
(Studi Kasus Perjanjian Kerjasama antara PT. Panji Putra  
Perkasa Cabang Yogyakarta dengan RSUP Dr. Sardjito)**

**INTISARI**

Eka Friemnes Maslakhah Yuniati Susanto..<sup>1</sup> Ninik Darmini.<sup>2</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pihak ketiga terhadap direksi yang melakukan tindakan *Ultra Vires* berdasarkan perjanjian kerjasama berupa akta di bawah tangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terhadap bentuk pertanggungjawaban atas tindakan *Ultra Vires* yang dilakukan oleh direksi terkait kerugian yang mungkin dialami oleh pihak ketiga.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat yuridis empiris dan normatif yaitu mendasarkan pada data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perlindungan hukum bagi pihak ketiga terhadap direksi yang baru berpotensi melakukan tindakan *ultra vires* berdasarkan perjanjian kerjasama berupa akta di bawah tangan dapat dilakukan pengkajian potensi kerugian yang mungkin ditimbulkan, sehingga dapat dilakukan upaya mencegah agar perjanjian-perjanjian selanjutnya tidak mengandung tindakan *ultra vires*. Dilihat dari sisi kelemahan akta di bawah tangan yang menimbulkan potensi masalah, perusahaan perlu mulai mempertimbangkan untuk menuangkan setiap aktivitas kegiatan usahanya dengan akta notariil. Bentuk pertanggungjawaban atas tindakan *ultra vires* yang dilakukan oleh Direksi terkait kerugian yang mungkin dialami oleh pihak ketiga antara lain, tanggung jawab pemegang saham, tanggung jawab komisaris, tanggung jawab direksi, dan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban Direksi dalam hal terbukti melakukan tindakan *ultra vires* adalah dengan melakukan *remedy* atau pemulihan terhadap pihak ketiga yang dirugikan, yaitu antara lain dapat berupa ratifikasi dan ganti rugi.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, *Ultra Vires*, Perjanjian Kerjasama, Akta di Bawah Tangan.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

<sup>2</sup> Dosen Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

## **LEGAL PROTECTION OF THIRD PARTIES IN THE EVENT OF DIRECTORS COMMITTED ULTRA VIRES ACT**

**(Case Study of Cooperation Agreement between PT Panji Putra  
Perkasa Yogyakarta Branch with Dr. Sardjito)**

### **ABSTRACT**

Eka Friemnes Maslakhah Yuniati Susanto..<sup>1</sup>Ninik Darmini.<sup>2</sup>

The purpose of this study is to identify and analyze the legal protection of third parties against directors, who perform the action of Ultra Vires based on cooperation agreement in the form of underhand deed. This study also aims to determine and analyze the form of liability for the actions of Ultra Vires conducted by the directors related to losses that may be experienced by third parties.

This is an empirical legal study, which is based on secondary data such the basic norms, basic rules, legislation, books and journals then continued with research on primary data in the field. All data were analyzed with qualitative methods.

The results showed the legal protection for third parties against new directors that potentially performing ultra vires based on cooperation agreement in the form of underhand deed can be done by doing potential assessment of potential losses that can be made to prevent subsequent agreements to not contain any ultra vires action. Judging from the weakness of the underhand deed that poses a potential problem, the company needs to start considering to pour any activity of its business activity by notarial deed. Forms of liability for ultra vires acts committed by the Board of Directors concerning losses that may be experienced by third parties, could be: the responsibility of shareholders, responsibilities of commissioners, responsibility of directors, and social and environmental responsibility. The form of liability of the Board of Directors in the event of a proven ultra vires act is to remedy or reinstate the injured third party, which may include ratification and compensation.

**Keywords:** Legal protection, Ultra Vires, Cooperation Agreement, Underhand Deed.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

<sup>2</sup> Dosen Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada